

Pengaruh Pengetahuan Anggaran terhadap Peran Anggota DPRD Kota Bandung dalam Pengawasan Anggaran

Muhammad Rifky Putra¹

Program Studi Akuntansi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia
rifkyputra@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to find out how the budget knowledge of the Bandung City DPRD is described and the role of Bandung City DPRD members in budget supervision and to obtain empirical evidence regarding the influence of budget knowledge on the DPRD's role in budget supervision. For this purpose, this research uses primary data. Data was taken by giving questionnaires to 23 (twenty-three) members of the Bandung City DPRD. Budget knowledge is used as an independent variable and budget monitoring as a dependent variable. The test used is a simple regression test. The test results of the coefficient of determination showed that budget knowledge had an influence of 44.8% on budget supervision, while the remaining 55.2% was the influence of other factors not studied. The results of analysis using linear regression show that the better the budget knowledge, the greater the budget supervision carried out by council members. The correlation coefficient value of the relationship between budget knowledge and budget supervision is in the strong category.

Kata Kunci: Pengetahuan Anggaran, Pengawasan Anggaran, DPRD Jawa Barat

LATAR BELAKANG

Salah satu tujuan utama negara Indonesia adalah menyejahterakan rakyatnya. Untuk mencapai hal tersebut maka pemerintah mencoba mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber lainnya agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu ciri terpenting dalam mewujudkan keseimbangan rakyat adalah dilangsungkannya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang timbul dalam masyarakat. Dengan diterbitkan undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi tonggak awal dari otonomi daerah. Dalam pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa:

“Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal”.

Sehubungan dengan ini, maka dalam mengatur masalah keuangan dan penganggaran agar dalam pencapaian otonomi daerah lebih nyata dan bertanggungjawab dibutuhkan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan

daerah dengan cara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Menurut Mardiasmo (2009), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan.

Kasus yang beberapa waktu lalu diselidiki oleh tim KPK adalah kasus penyelewengan dana Bansos Kota Bandung yang melibatkan Walikota Bandung, Dada Rosada beserta Sekdanya Edi Siswandi yang melakukan kasus suap kepada hakim Setyabudi. Kasus penyelewengan dana Bansos ini merupakan salah satu bentuk kebocoran anggaran (Kompasiana, 24 Maret 2013). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jaka Winarna (2007) mengenai pengaruh *personal background, political background* dan juga pengetahuan dewan terhadap peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah menunjukkan bahwa hanya pengetahuan dewan tentang anggaran saja yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Penelitian ini mencoba melakukan pengamatan kembali dengan meneliti pengaruh pengetahuan anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan anggaran. Namun yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah subjeknya. Jaka Winarna (2007) memakai DPRD wilayah karesidenan Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian Murni dan Witono (2004) pada DPRD Surakarta. Sedangkan disini peneliti memakai DPRD Kota Bandung. Penelitian ini juga berusaha untuk menggambarkan dan menjawab beberapa hal seperti gambaran pengetahuan anggaran DPRD Kota Bandung; peran anggota DPRD Kota Bandung dalam pengawasan anggaran; serta pengaruh pengetahuan anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan anggaran.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Tentang Pengawasan Anggaran

Pemerintahan yang baik salah satunya bisa dilihat dan dinilai dari segi anggaran. Pemerintah dituntut untuk bisa menyediakan laporan keuangan, karena laporan keuangan merupakan alat pengendali dan evaluasi kinerja pemerintah dan unit pemerintah daerah. Conner et al (dalam Griffith et al, 1999) menyebutkan bahwa pengetahuan merupakan sumber daya yang penting bagi suatu organisasi. Jadi pengawasan sangat penting dilakukan agar tidak terjadinya penyelewengan penggunaan keuangan daerah terkait dengan penerapan kebijakan dalam siklus anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DPRD merupakan lembaga yang diberikan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah/APBD. Apabila DPRD menjalankan fungsinya dengan baik, maka pengelolaan keuangan daerah pun berjalan dengan baik sehingga menghasilkan kinerja yang baik, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009) bahwa akuntabilitas tidak hanya sekedar kemampuan untuk menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan tapi menunjukkan bahwa uang tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Keuangan negara dapat dikatakan sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara yang dinilai dengan uang

dengan catatan penyelenggaraan pemerintah sebagai perwujudannya dilakukan pengidentifikasian atas segala bentuk kekayaan, hak dan kewajiban yang tercantum dalam APBN. Dalam hal ini pengetahuan anggaran menurut Truman (1960) meliputi 3 indikator, diantaranya pemahaman tentang APBD, pemahaman tentang penyusunan APBD dan mengidentifikasi terhadap kebocoran APBD.

Pengawasan sangat penting dilakukan agar tidak terjadinya penyelewengan penggunaan keuangan daerah terkait dengan penerapan kebijakan dalam siklus anggaran sesuai dengan hukum yang berlaku. Tetapi sebelum masuk ke dalam tahap pelaksanaan, anggota dewan harus memiliki kemampuan akan pengetahuan yang cukup mengenai anggaran sehingga pada saat melaksanakan fungsinya mampu mendeteksi adanya penyimpangan yang terjadi. Pengawasan tersebut bukan berarti pemeriksaan, tapi lebih mengarah pada pengawasan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Hal ini sesuai juga dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD. Ini berarti bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan pengawasan eksternal dan ditekankan pada pencapaian sasaran APBD.

Berdasarkan teori diatas, maka dalam pengawasan anggaran menurut Mardiasmo (2009) terdapat 4 indikator, yaitu : (1) Pengawasan saat perencanaan; (2) Pengawasan saat pengesahan; (3) Pengawasan saat pelaksanaan, dan (4) Pengawasan saat pertanggungjawaban. Setelah melaksanakan tugas serta fungsinya, tahapan terakhir adalah pencapaian kinerja yang dilakukan oleh dewan. Pencapaian kinerja ini dinilai dari seberapa berhasilkah pencapaian yang dikaitkan dengan anggaran yang ditetapkan, dimana anggaran adalah alat yang efektif dalam pengendalian dan penilaian kinerja.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif dan studi kasus. Yang berperan sebagai variabel independen (variabel X) dalam penelitian ini yakni Pengetahuan Anggaran dan yang berperan sebagai variabel dependen (variabel Y) dalam penelitian ini yakni Pengawasan Anggaran. Populasi dalam penelitian ini adalah semua anggota DPRD Kota Bandung. Untuk sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh, berarti semua anggota DPRD Kota Bandung dijadikan sampel.

Teknik Analisis Data dan Rancangan Pengujian Hipotesis

1. Uji Asumsi Klasik

Pengujian model regresi linier sederhana dalam menguji hipotesis harus menghindari kemungkinan penyimpangan asumsi klasik. Dalam penelitian ini asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji linieritas, dan uji heterokedastisitas.

2. Analisis Regresi Sederhana

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen

apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan (Sudjana, 2004).
Rumus regresi linear sederhana sebagai berikut :

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan :

Y = Variabel dependen

X = Variabel independen

a = Konstanta (nilai Y apabila X=0)

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan jika bernilai positif ataupun penurunan jika bernilai negatif)

e = error

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mencari besarnya pengaruh variabel independen (Riduwan, 2012). Untuk mengetahui besarnya koefisien determinan, dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD = Koefisien determinan

r^2 = Nilai koefisien korelasi *product moment*

4. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan uji t. Menurut Riduwan (2012) uji signifikansi berfungsi apabila peneliti ingin mencari makna pengaruh variabel X terhadap Y, rumusnya adalah :

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{(1-r^2)}$$

Keterangan:

t = nilai t hitung

r = Koefisien korelasi *Pearson Product Moment*

n = Banyaknya responden

Kriteria keputusan:

Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$; maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$; maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Hipotesis statistik yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H_0 : $b = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh antara Pengetahuan Anggaran (variabel X) dengan Pengawasan Anggaran (variabel Y).

H_a : $b \neq 0$, artinya terdapat pengaruh antara Pengetahuan Anggaran (variabel X) dengan Pengawasan Anggaran (variabel Y).

HASIL DAN DISKUSI

1. Uji asumsi Klasik
a. Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil Pengujian Normalitas Data

Variabel	N	D	Z	Asymp. Sig. (2-tailed)
Pengetahuan Anggaran (X)	23	0,180	0,864	0,445
Pengawasan Anggaran (Y)	23	0,092	0,443	0,990

(Sumber: SPSS V.20, diolah)

Hasil pengujian normalitas data pengetahuan anggaran (X) menunjukkan bahwa berdistribusi normal. Kesimpulan ini ditunjukkan dengan $Z = 0,864 < 1,645$ dan Asymp. Sig untuk masing-masing kelompok data variabel yang digunakan lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Artinya data pengetahuan anggaran (X) memiliki distribusi yang normal. Hasil pengujian normalitas data pengawasan anggaran (Y) menunjukkan bahwa berdistribusi normal. Kesimpulan ini ditunjukkan dengan $Z = 0,443 < 1,645$ dan Asymp. Sig untuk masing-masing kelompok data variabel yang digunakan lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Artinya data pengawasan anggaran (Y) memiliki distribusi yang normal.

b. Uji Linieritas

Tabel 2. Hasil Uji Linieritas Regresi Variabel X atas Y

ANOVA Table			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Pengawasan Anggaran (Y) *	Between Groups	(Combine d) Linearity	386,051	11	35,096	2,019	,130
Pengetahuan Anggaran (X)	Within Groups	Deviation from Linearity	258,565	1	258,565	14,878	,003
			127,485	10	12,749	,734	,684
			191,167	11	17,379		
	Total		577,217	22			

(Sumber: SPSS V.20, diolah)

Dasar pengambilan keputusan bila $F_{hitung} > F_{tabel(0,05; DF1 = 1; DF2=11)}$ (4,844) berarti data berpola linier. Tabel 4.20 menunjukkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ sebesar $258,565 > 4,844$ maka H_0 ditolak, begitu juga dengan nilai signifikansi $0,009 < 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya hubungan pengetahuan anggaran terhadap pengawasan anggaran adalah linier.

c. Uji heterokedastisitas

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas

		Correlations		
			abs	Pengetahuan Anggaran (X)
Spearman's rho	abs	Correlation Coefficient	1,000	,102
		Sig. (2-tailed)	.	,643
		N	23	23
	Pengetahuan Anggaran (X)	Correlation Coefficient	,102	1,000
		Sig. (2-tailed)	,643	.
		N	23	23

(Sumber :SPSS V.20, diolah)

Hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians dari residual homogen (tidak terdapat heteroskedastisitas). Hal ini ditunjukkan oleh hasil koelasi X dengan nilai absolut dari residual (error) tidak signifikan pada level 5%. Diperoleh nilai signifikansi uji 0,643 lebih besar dari 0,05 sebagai batas tingkat kekeliruan.

2. Analisis Regresi Linier Sederhana

Tabel 4. Koefisien Regresi Pengetahuan Anggaran

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17,480	5,359		3,262	,004
	Pengetahuan Anggaran (X)	,731	,177	,669	4,128	,000

a. Dependent Variable: Pengawasan Anggaran (Y)

Berdasarkan Tabel 4.22 hasil persamaan regresi pengetahuan anggaran terhadap pengawasan anggaran adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 17,480 + 0,731 X$$

Dimana:

Y = Pengawasan Anggaran
 X = Pengetahuan Anggaran

Pada persamaan diatas, nilai konstanta sebesar 17,480 menunjukkan rata-rata skor pengawasan anggaran. Artinya jika tidak ada perubahan pengetahuan anggaran, maka skor rata-rata pengawasan anggaran sebesar 17,480. Pengetahuan anggaran memiliki koefisien bertanda positif sebesar 0,731, artinya setiap peningkatan skor pengetahuan anggaran satu satuan diprediksi akan meningkatkan skor pengawasan anggaran sebesar

0,731. Dengan demikian dapat diartikan bahwa semakin baik pemahaman tentang APBD, memiliki pemahaman tentang cara penyusunan APBD, mampu mengidentifikasi kebocoran APBD maka akan semakin baik pula pengawasan saat penyusunan, pengawasan saat pengesahan, pengawasan saat pelaksanaan dan pengawasan saat pertanggung jawaban oleh anggota dewan.

3. Koefisien Determinasi

Tabel 5. Koefisien Determinasi Pengetahuan Anggaran

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,669 ^a	,448	,422	3,89537

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Anggaran (X)
 b. Dependent Variable: Pengawasan Anggaran (Y)

Berdasarkan data pada tabel 4.24 di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,448 atau 44,8%. Artinya pengetahuan anggaran memberikan pengaruh sebesar 44,8% terhadap pengawasan anggaran. Sedangkan sisanya yaitu 55,2% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

4. Uji Hipotesis

Tabel 6. Uji t Pengetahuan Anggaran

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17,480	5,359		3,262	,004
	Pengetahuan Anggaran (X)	,731	,177	,669	4,128	,000

a. Dependent Variable: Pengawasan Anggaran (Y)

Nilai statistik uji t yang diperoleh pada pengujian pengaruh pengetahuan anggaran terhadap pengawasan anggaran dapat dilihat pada tabel 4.25. Diperoleh nilai t_{hitung} variabel pengetahuan anggaran sebesar 4,128 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000.

Hasil yang diperoleh dari perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,128 > 2,080$) dan dilihat dari nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_a yang berarti pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan anggaran. Sehingga hipotesis yang penulis ajukan diterima yaitu: “pengetahuan anggaran berpengaruh terhadap pengawasan anggaran”.

Pengetahuan Anggaran Anggota DPRD

Secara keseluruhan penilaian untuk pengetahuan anggaran yang diberikan responden yang dijadikan sampel penelitian masuk dalam kategori cukup baik. Penilaian untuk ketiga indikator yaitu pemahaman tentang APBD, memiliki pemahaman tentang cara penyusunan APBD dan mengidentifikasi terhadap kebocoran APBD diperoleh ketiganya

masuk dalam kategori cukup baik. Dalam penelitian ini, untuk skor terendah diperoleh pada indikator pemahaman tentang APBD mengenai pengeluaran belanja barang daerah menggunakan prinsip hemat, efektif, efisien dan sesuai dengan peraturan perundangan. Sedangkan untuk skor tertinggi pada indikator identifikasi terhadap kebocoran di APBD mengenai anggaran dikelola secara transparan dan akuntabel untuk meminimalkan terjadinya kebocoran. Hasil dari penelitian mengenai pengetahuan anggaran ini menunjukkan bahwa pengetahuan dewan termasuk ke dalam kategori yang cukup baik, hal ini dikarenakan beberapa alasan seperti latar belakang pendidikan anggota dewan yang tidak seluruhnya berasal dari jurusan ekonomi serta minimnya pengetahuan SDM terutama mengenai anggaran.

Pengetahuan merupakan sumber daya yang sangat penting bagi suatu organisasi dan memegang peranan penting agar suatu organisasi dapat berjalan secara maksimal. Dengan pengalaman dan pengetahuan anggaran yang tinggi dapat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukannya. Alat utama dalam anggaran publik yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggungjawab.

Oleh sebab itu, agar APBD ini berjalan sesuai dengan tujuannya diharapkan pihak legislatif memiliki pengetahuan yang mendukung dan memadai dalam penyusunan anggaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 pasal (4) dan (5) yang menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, serta bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan.

Pengawasan Anggaran Anggota DPRD

Pengawasan anggaran secara keseluruhan dinilai sudah cukup efektif. Jika dilihat masing-masing indikator yaitu pengawasan saat penyusunan, pengawasan saat pengesahan, pengawasan saat pelaksanaan dan pengawasan saat pertanggungjawaban diperoleh keempatnya masuk dalam kategori cukup efektif. Dalam penelitian ini, untuk skor terendah diperoleh pada indikator pengawasan saat pelaksanaan terutama mengenai pemantauan pelaksanaan APBD agar sesuai dengan rencana, sedangkan untuk skor tertinggi didapat dari indikator pengawasan saat pertanggungjawaban mengenai setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta akan menanyakan Laporan Pertanggungjawaban masing-masing SKPD apabila terjadi kejanggalan.

Hasil dari penelitian terhadap variabel pengawasan anggaran menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Bandung termasuk ke dalam kategori cukup efektif, hal ini disebabkan oleh pengaruh dari pengetahuan anggaran yang sudah cukup baik sehingga berdampak terhadap meningkatnya pengawasan anggaran yang dilakukan oleh anggota dewan. Pengawasan sangat perlu dilakukan untuk mengetahui anggaran yang telah disusun dapat berjalan dengan efisien, efektif, dan

ekonomis. Kegiatan pengawasan ini dilakukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tujuan pengawasan APBD untuk menjaga anggaran yang disusun benar-benar dijalankan, menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan yang telah digariskan dan menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Bandung mulai dari tahapan pengawasan saat perencanaan, pengawasan saat pengesahaan, pengawasan saat pelaksanaan, dan pengawasan saat pertanggungjawaban. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD diharapkan dapat mendapat masukan bagi pengambilan keputusan untuk mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan.

Analisis Pengaruh Pengetahuan Anggaran Terhadap Pengawasan Anggaran

Pada rumusan masalah yang ketiga dan hipotesis kedua ini peneliti ingin mengetahui apakah pengetahuan anggaran berpengaruh terhadap pengawasan anggaran. Dari hasil pengujian data untuk mengetahui adanya pengaruh antar variabel menggunakan regresi sederhana dengan program IBM SPSS Version 20 menghasilkan pengetahuan anggaran berpengaruh dengan hubungan kuat terhadap pengawasan anggaran.

Hasil analisis dengan menggunakan regresi linier menunjukkan koefisien bertanda positif, artinya setiap peningkatan skor pengetahuan anggaran satu satuan diprediksi juga akan meningkatkan skor pengawasan anggaran. Dengan demikian dapat diartikan semakin baik pengetahuan anggaran akan semakin meningkatkan pengawasan anggaran.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Yulinda Devi Pramita dan Lilik Andriyani (2010) mengenai “Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD) pada DPRD Se-Karesidenan Kedu”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh dalam kinerja anggota DPRD dalam mengawasi anggaran. Dalam penelitiannya membuktikan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

Penelitian yang dilakukan oleh Simson Werimon, Imam Ghozali dan Mohamad Nazir (2007) tentang “Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah APBD di Provinsi Papua”, mendapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang positif signifikan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan anggaran. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sopanah dan Mardiasmo (2003) tentang “Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah pada Kota Batu Malang”, mendapatkan hasil bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan APBD.

Hasil dari beberapa penelitian tersebut mendukung teori yang diungkapkan oleh Truman (1960) yaitu pengalaman dan pengetahuan anggaran yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Kinerja pengawasan DPRD akan semakin meningkat apabila pengetahuan anggarannya baik, karena Mardiasmo (2009:189) mengungkapkan bahwa pengawasan diperlukan pada setiap tahap, dikarenakan pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa anggota DPRD Kota Bandung telah menjalankan perannya dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengolahan kuesioner variabel pengetahuan anggaran dari indikator pemahaman tentang APBD, memiliki pemahaman tentang cara penyusunan APBD, dan mengidentifikasi terhadap kebocoran APBD dapat diinterpretasikan nilainya dengan cukup baik. Hasil cukup baik dari semua indikator variabel pengetahuan anggaran berjalan searah dengan hasil pengolahan kuesioner variabel pengawasan anggaran yang terdiri dari indikator pengawasan saat penyusunan, pengawasan saat pengesahan, pengawasan saat pelaksanaan dan pengawasan saat pertanggungjawaban memiliki nilai cukup efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, penulis dapat memberikan simpulan untuk penelitian yang berkaitan dengan pengaruh pengetahuan anggaran terhadap pengawasan anggaran di DPRD Kota Bandung: (1) Pengetahuan anggaran secara keseluruhan masuk dalam kategori cukup baik. Penilaian untuk ketiga indikator yaitu pemahaman tentang APBD, memiliki pemahaman tentang cara penyusunan APBD dan mengidentifikasi terhadap kebocoran APBD diperoleh ketiganya masuk dalam kategori cukup baik; (2) Pengawasan anggaran secara keseluruhan dinilai sudah cukup efektif. Jika dilihat masing-masing indikator indikator yaitu pengawasan saat penyusunan, pengawasan saat pengesahan, pengawasan saat pelaksanaan dan pengawasan saat pertanggungjawaban diperoleh keempatnya masuk dalam kategori cukup efektif; (3) Terdapat pengaruh kuat antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan anggaran. Hasil analisis dengan menggunakan regresi linear menunjukkan semakin baik pengetahuan anggaran akan semakin meningkatkan pengawasan anggaran. Berdasarkan nilai koefisien korelasi keeratan hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan anggaran masuk dalam kategori kuat.

REFERENSI

- Abdul Halim. (2002). *Manajemen Keuangan Daerah (edisi revisi)*. Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
- Alamsyah. (1997). *Mekanisme Pengawasan APBD di Kabupaten Sleman*. Tesis Map UGM, Yogyakarta.
- Cahyat, A. (2004). *Sistem Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten*. Pembahasan Peraturan Perundangan di Bidang Pengawasan. Governance Brief Number 3.
- Nordiawan, D., & Ayuningtyas. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Griffith, T., Sawyer, J., & Neale, A. (1999). *Information Technology as a Jealous Mistress: Competition for Knowledge Between Individuals and Organization*.
- Hengky, L., & Ghozali, I. (2012). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi SMARTPLS 2.0 M3*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Husain, U. (2008). *Desain Penelitian: Akuntansi Keprilakuan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Dharmanegara,I. (2010). *Penganggaran Perusahaan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ghozali, I. (2007). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Indriantoro, Nur.dan Bambang Supomo. (2009). *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi I. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Persada.
- Murni, S., & Witono, B. (2004). *Pengaruh Personal Background dan Political Background terhadap Peranan DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah*. *Perspektif*, Vol. 9.
- Mustopadidjaja. (2003). *Peran Aparatur Pengawasan Dalam Mencegah KKN, Beberapa Implikasi Pendekatan TQM*. Inspektorat Jenderal Pengawasa, Departemen Perikanan dan Kelautan . 16 September.
- Pakde Kartono. (2013, 24 Maret). Walikota dan Sekda Bandung Atur Kasus Bansos sejak Penyidikan dan Persidangan. *Kompasiana* [Online], halaman 1. Tersedia: <http://hukum.kompasiana.com>. [17 Juli 2013]
- Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

- Riduwan. (2012). *Dasar-dasar Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Saefullah, dan Ernie. (2005). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo.
- Sastroatmodjo, Sudijono. (1995). *Perilaku Politik*. Semarang : IKIP Semarang Press.
- Shafritz, Jay M. dan E.W. Russell. (1997). *Introducing Public Administration*. New York: Longman.
- Singgih Santoso. (2011). *Structural Equation Modelling (SEM) Konsep dan Aplikasi AMOS 18*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.
- Soekidjo Notoatmodjo . (2005). *Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soetrisno dan Rita Hanafie. (2007). *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sopannah dan Mardiasmo. (2003). “*Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah*”. Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya.
- Sugiyono. (2012). *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sule Erni Trisnawati, dan Kurniawan Saefullah. (2005). *Pengantar Manajemen (edisi pertama, cetakan pertama)*. Jakarta: Prenada Media Jakarta.
- Syahruddin dan Taifur, Werry Darta. 2002. *Peran DPRD Untuk Mencapai Tujuan Desentralisasi dan Perspektif Daerah Tentang Pelaksanaan Desentralisasi*. Faculty of Economics Pusat Studi Kependudukan, Universitas Andalas.
- Truman, David B. 1960. *The Governmental Process: Political Interest and Public Opinion*. New York: Alfred A Knopf.
- Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR dan DPRD.
- Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Werimon, S., Ghozali, I. dan Nazir, M. (2007). “ *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Study Empiris di Provinsi Papua)*”. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
- Winarna Jaka dan Murni. (2007). *Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah*. Artikel. Simposium Nasional Hasil Penelitian Akuntansi 10, Makasar